



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TREN KORUPSI TAHUN 2023

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

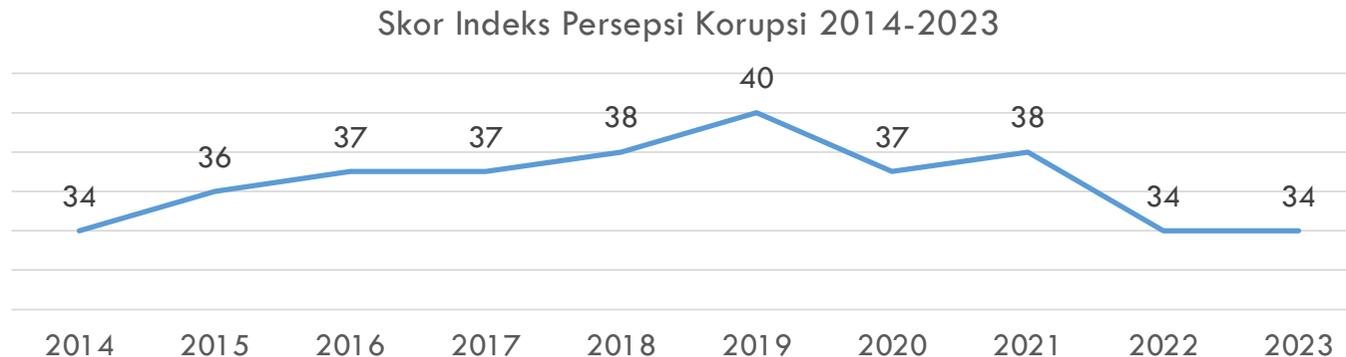
Mei 2024

www.antikorupsi.org



Latar Belakang

- Sejak tahun 2004, ICW secara konsisten meluncurkan laporan hasil pemantauan atas tren korupsi yang terjadi di Indonesia
- Laporan ini dapat dijadikan sebagai gambaran komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi
- Salah satu indikator untuk menilai situasi korupsi di Indonesia adalah IPK yang secara berkala dikeluarkan oleh TI





Latar Belakang

- Selain IPK, indeks dalam negeri yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah IPAK yang dikeluarkan oleh BPS – Pada tahun 2023 menunjukkan IPAK Indonesia masih rendah 3,93 dari skala 0 sampai 5 (tidak mencapai target RPJMN)
- Indikator itu secara nyata terkema dalam bentuk kekecewaan publik berdasarkan tren kepercayaan masyarakat terhadap sektor pemberantasan korupsi di era Jokowi – Lembaga Survei Indikator menilai 35% masyarakat menilai pemberantasan korupsi kian buruk, dan hanya 32,7% yang menilai baik.



Tujuan Pemantauan

1. Memberikan gambaran umum mengenai tren korupsi dari tahun ke tahun, yang diurai berdasarkan kasus, jumlah tersangka, modus operandi, sektor, pemetaan wilayah, hingga latar belakang profesi atau jabatan tersangka; dan
2. Sebagai rekomendasi untuk menyusun strategi perbaikan kebijakan pencegahan korupsi pada tiap variable terpantau



Metode Pemantauan

- Tabulasi data;
 - Pencarian informasi dilakukan pada setiap kabupaten dan kota di 38 provinsi di Indonesia dan tingkat nasional
 - Data informasi berasal dari media daring baik di level daerah maupun nasional dan/atau situs resmi penegak hukum;
 - Olah data;
- Data komparasi;
- Analisis deskriptif.



Batasan Pemantauan

1. Periode pemantauan dilakukan dari tanggal 1 Januari – 31 Desember 2023
2. Seluruh data korupsi yang ditabulasi merupakan perkara yang masuk ke tahap penyidikan atau sudah ada penetapan tersangka
3. Informasi kasus lebih banyak diperoleh dari sumber sekunder, karena informasi resmi dari instansi penegak hukum faktanya masih sulit ditemukan



Temuan Umum

Kasus



791 Kasus

Tersangka



1.695 Orang

Kerugian Negara



Rp28,4 Triliun

Suap



Rp422 Miliar

Pungutan Liar



Rp10 Miliar

Pencucian Uang

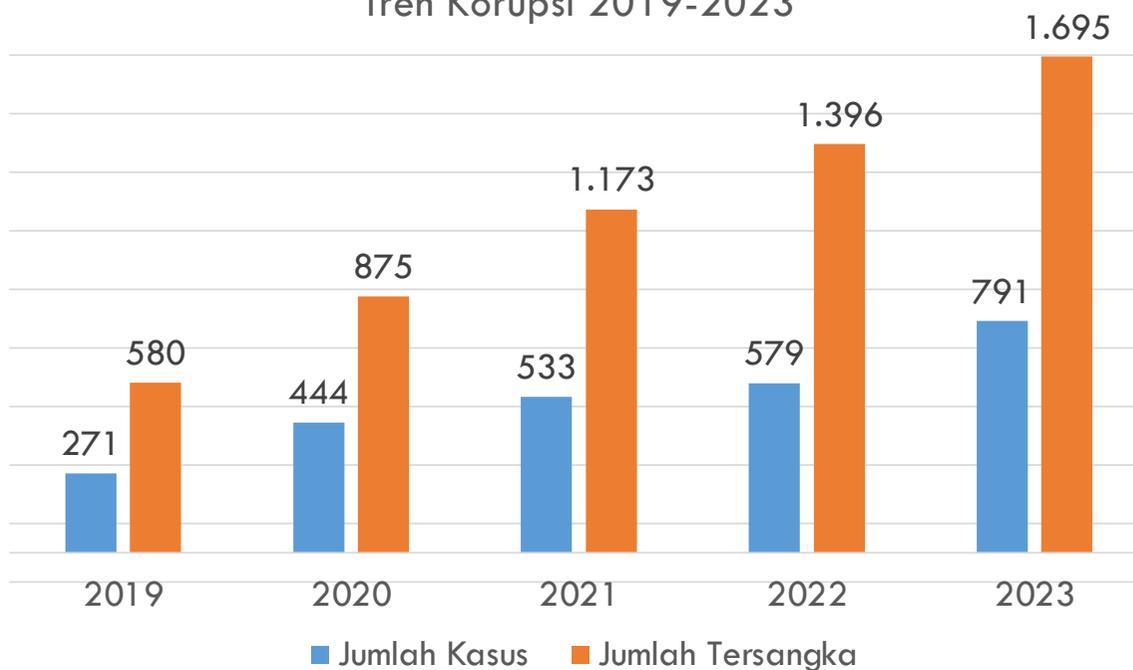


Rp256 Miliar



Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019-2023

Tren Korupsi 2019-2023

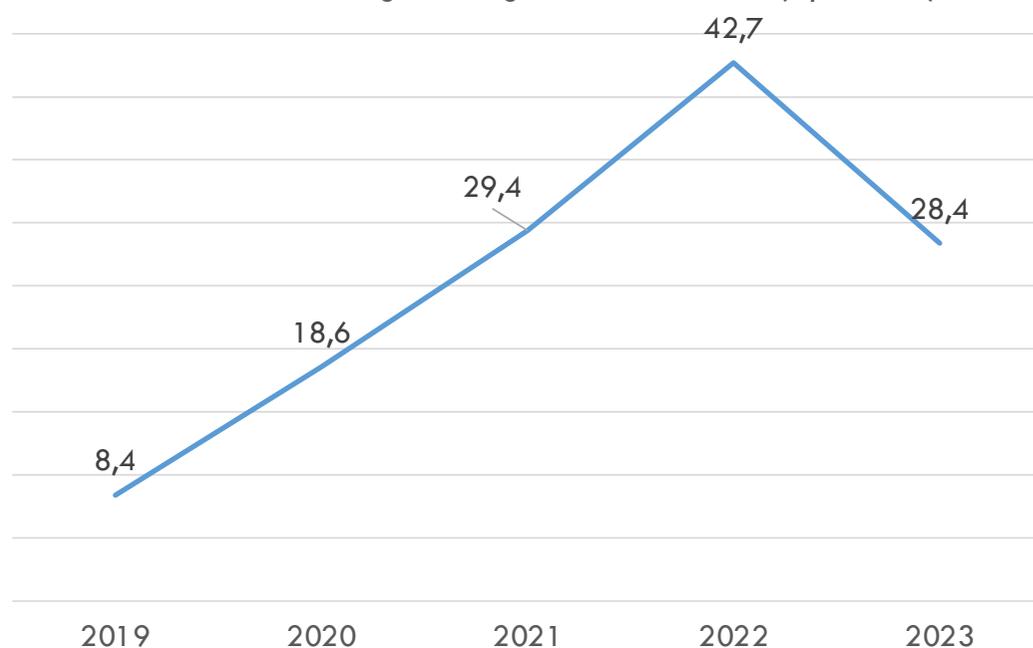


- Pada tahun 2023, terjadi lonjakan jumlah kasus dan tersangka yang cukup masif
- Faktor penyebabnya, belum optimalnya strategi penindakan melalui pemidanaan yang menjerakan dan strategi pencegahan
- Setiap kasus yang terpantau harus dipastikan tidak berhenti pada tahap penyidikan
- APH juga perlu melakukan upaya pengembangan kasus hingga mampu menyorot aktor-aktor lain yang diduga turut terlibat



Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2019-2023

Tren Potensi Kerugian Negara 2019-2023 (Rp Triilun)

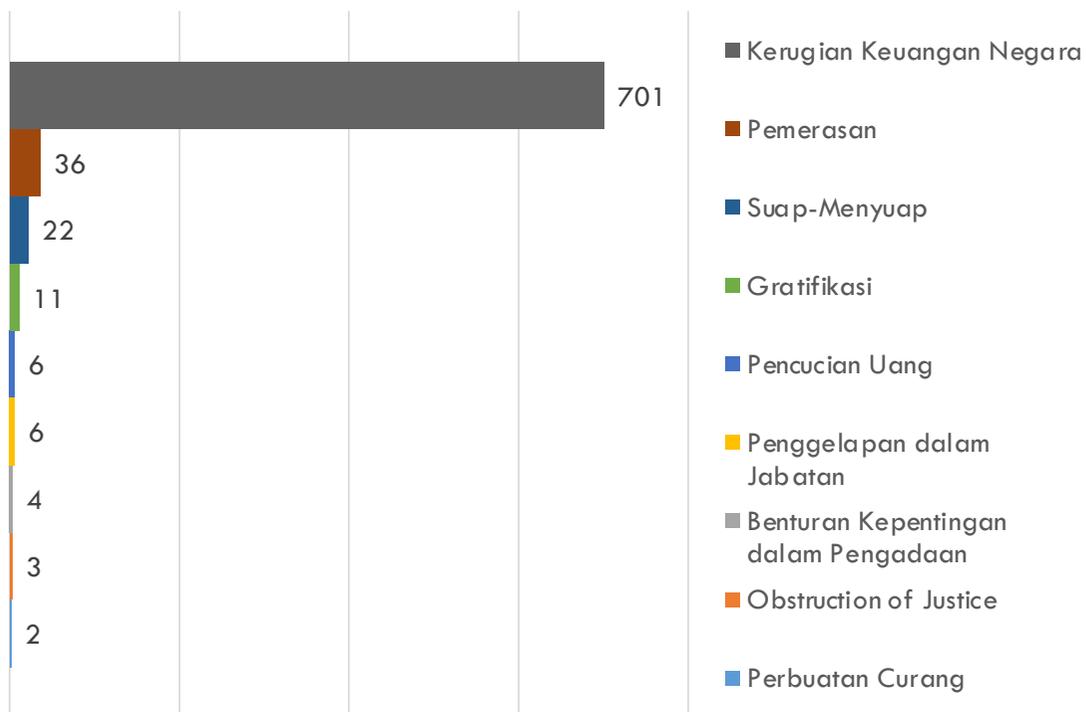


- Meski terjadi penurunan, namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar;
- Temuan ini menjadi catatan atas buruknya pengelolaan keuangan negara dan lemahnya pengawasan terhadap sistem manajemen keuangan negara;
- Besarnya potensi kerugian negara yang terungkap harus diikuti dengan upaya pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan aset hasil korupsi



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Tahun 2023

Pasal Penyidikan

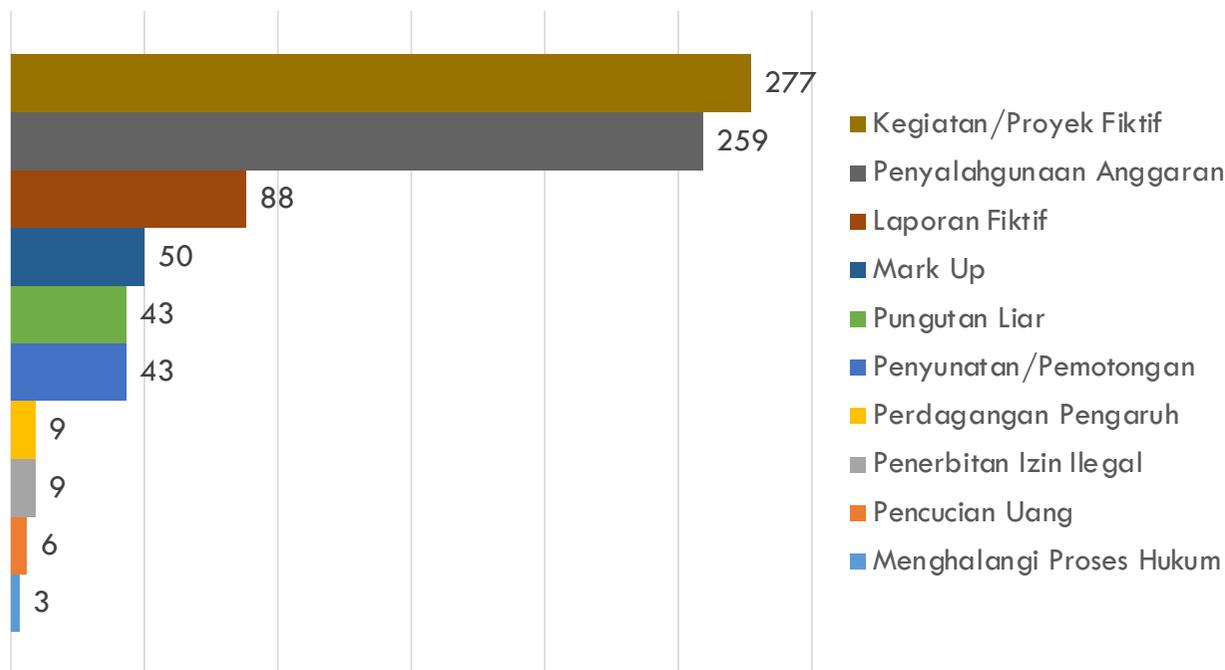


- Pada tahun 2023, APH menggunakan pasal pada setiap 7 jenis korupsi
- 89% diantaranya korupsi dengan jenis Kerugian Negara (Pasal 2 ayat (1) /3 UU Tipikor)
- Dari 791 kasus terpantau, APH tercatat hanya 6 kali menangani kasus pencucian uang
- Menunjukkan bahwa perlu ada upaya peningkatan kompetensi APH
- Selain kompetensi APH, upaya pemberantasan korupsi juga perlu didukung dari penguatan substansi hukum



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2023 (10 besar)

Modus Korupsi 2023 (10 Besar)

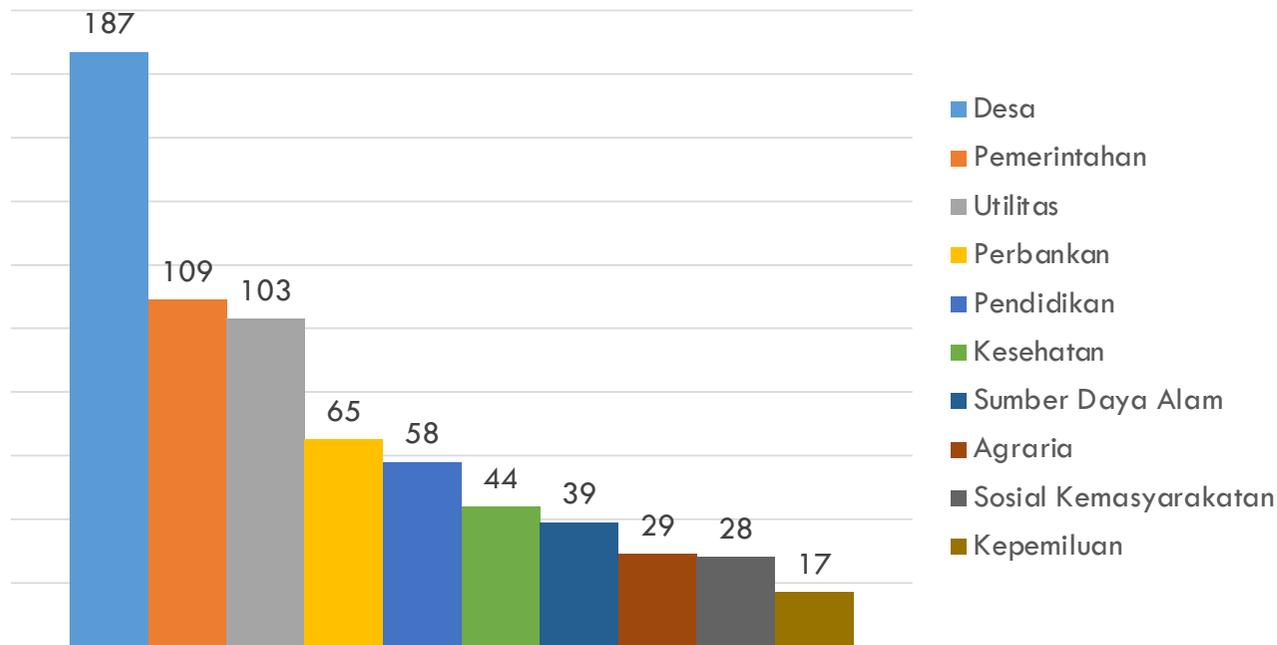


- Modus operandi dipetakan untuk melihat kecenderungan atas pola para tersangka korupsi melakukan kejahatannya
- Tiga besar modus paling jamak dilakukan pada umumnya akan berkaitan dengan proyek infrastruktur pemerintah
- Akan tetapi dari 791 kasus, korupsi terkait infrastruktur hanya 21%. Artinya korupsi lebih banyak berdimensi proyek atau kegiatan non infrastruktur



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2023 (10 besar)

Sektor Korupsi 2023 (10 Besar)



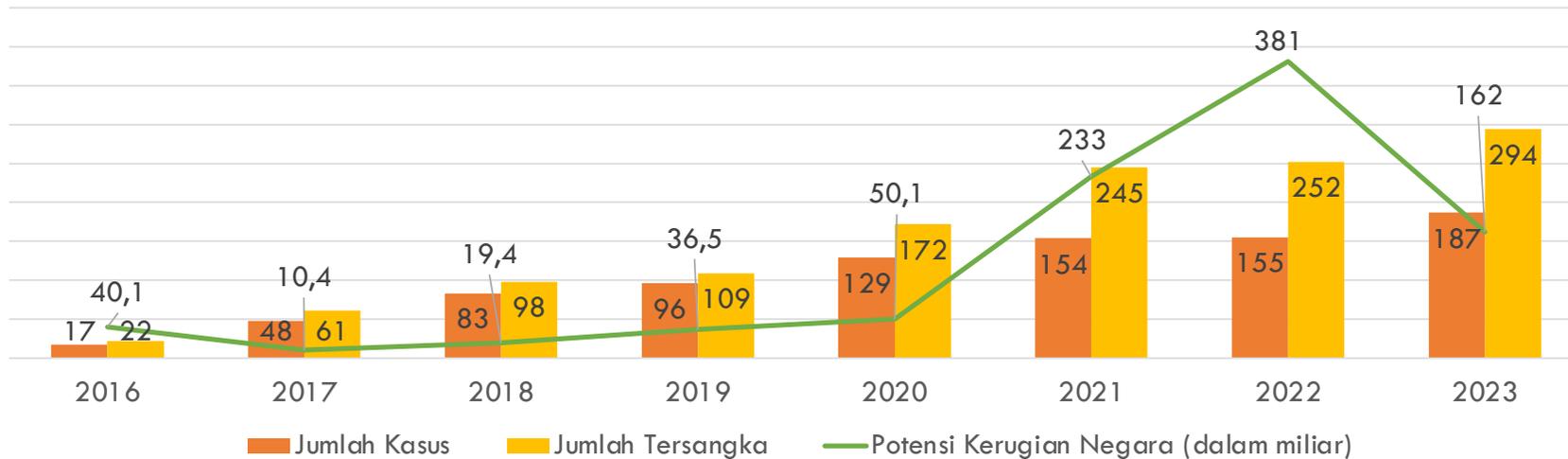
- Pada tahun 2023, total terdapat 21 sektor korupsi yang berhasil terpantau
- Seperti temuan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah sektor masih kerap menempati peringkat teratas sebagai domain yang kerap ditangani oleh APH



Korupsi Desa

- Sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa

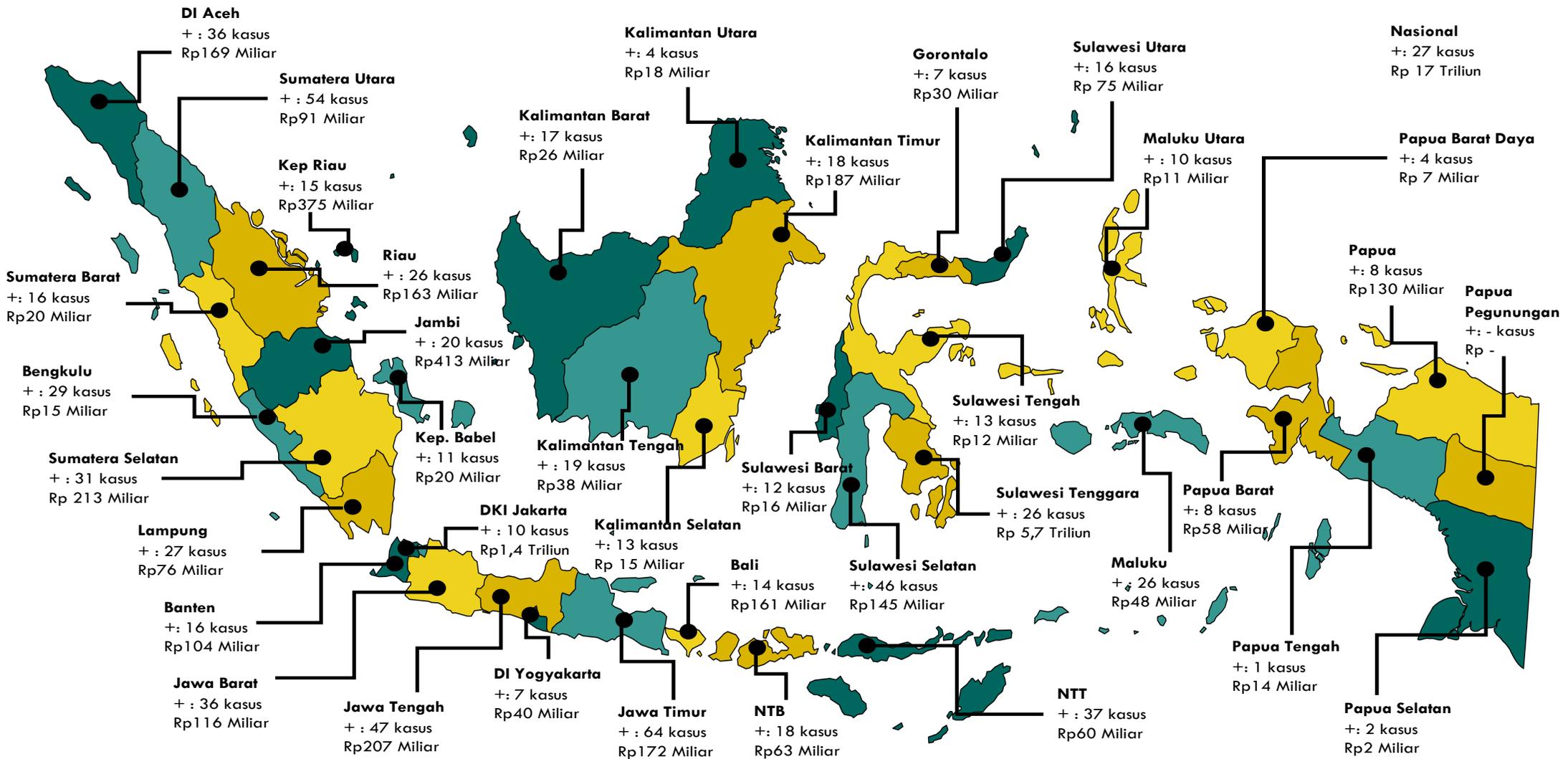
Tren Korupsi Sektor Desa 2016-2023



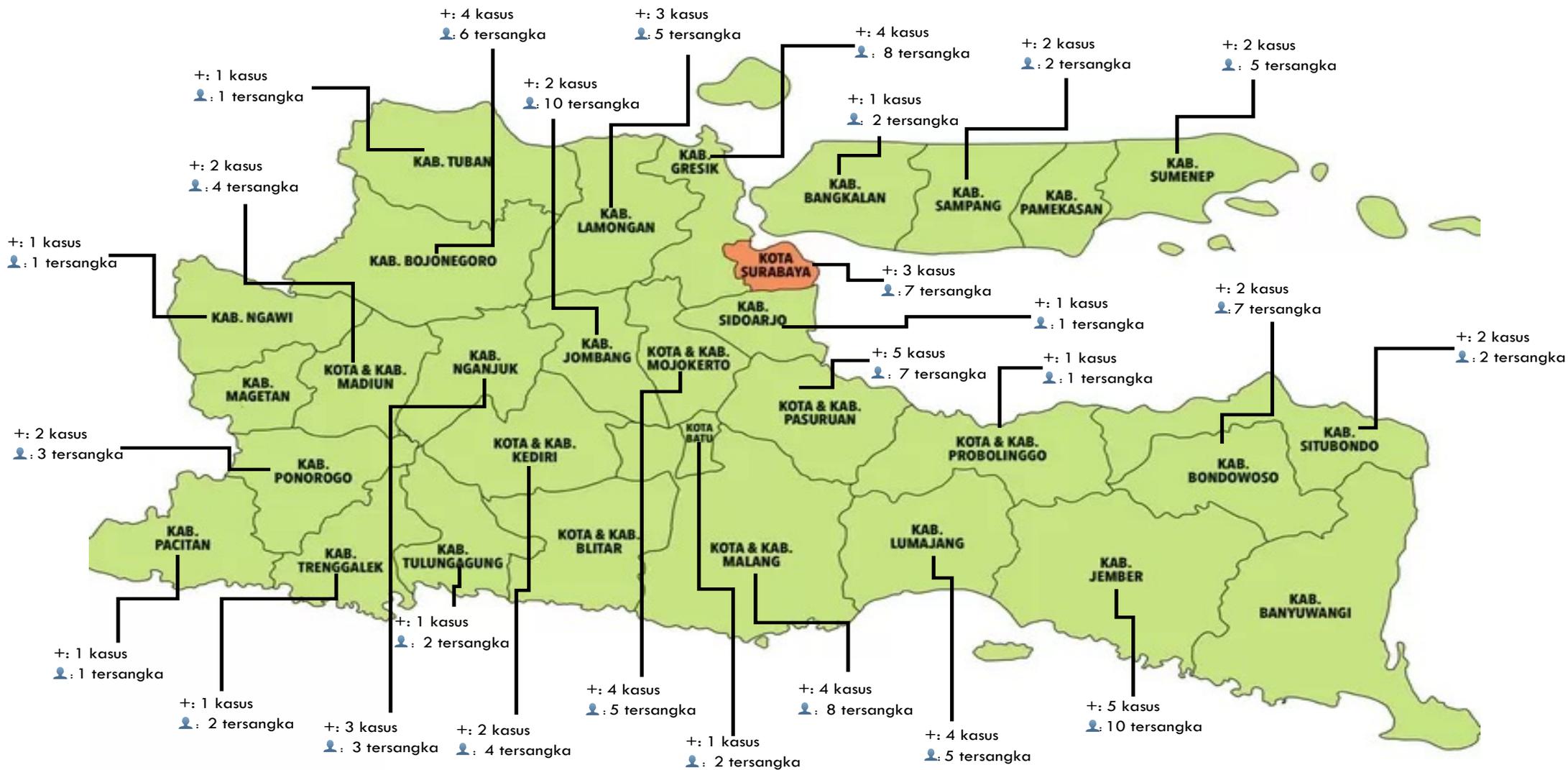


Korupsi Sektor Desa 2016-2023

- Pada tahun 2023, pemerintah menganggarkan sebesar Rp68 triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia (belum termasuk ADD dari APBD)
- Jika dibandingkan keseluruhan jumlah desa, jumlah kasus yang terungkap memang tergolong kecil. Namun, hal ini perlu menjadi dilihat sebagai fenomena gunung es
- ICW melihat revisi UU Desa tidak menjawab akar masalah korupsi sektor desa
- ICW mendorong adanya perbaikan mekanisme pengelolaan dana desa dan pemerintah melalui Kemendes PDTT perlu mengaktifasi kembali Satgas DD untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa



Pemetaan Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2023

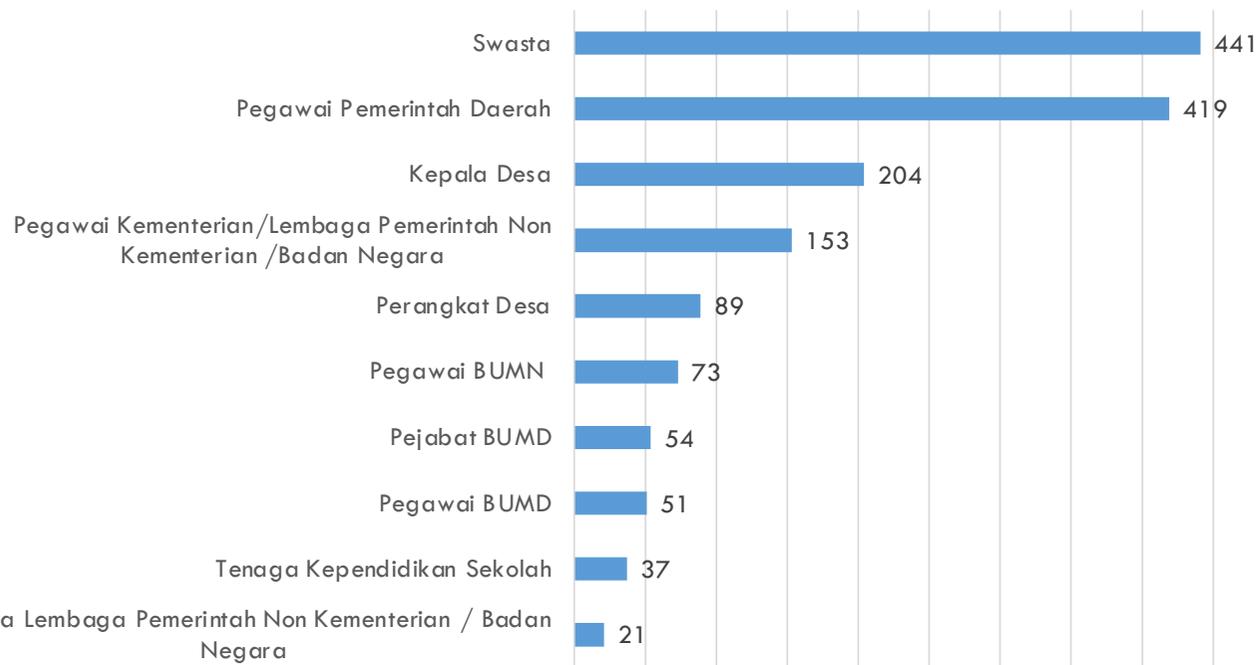


Detail Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Tahun 2023 (Top 10)

Jabatan Tersangka Korupsi 2023



- ICW berhasil mengidentifikasi sebanyak 24 latar belakang profesi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi
- Hasil klasifikasi berdasarkan status kepegawaiannya, dari total 1.695 tersangka, hanya sekitar 38% yang berstatus ASN, 61,8% bukan ASN, dan 0,2% sisanya merupakan badan hukum korporasi
- Jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah sebanyak 3 korporasi (dalam satu kasus) ditangani oleh Kejaksaan Agung.
- Tidak ditemukan informasi mengenai penanganan kasus korupsi korporasi yang dilakukan oleh KPK dan Kepolisian



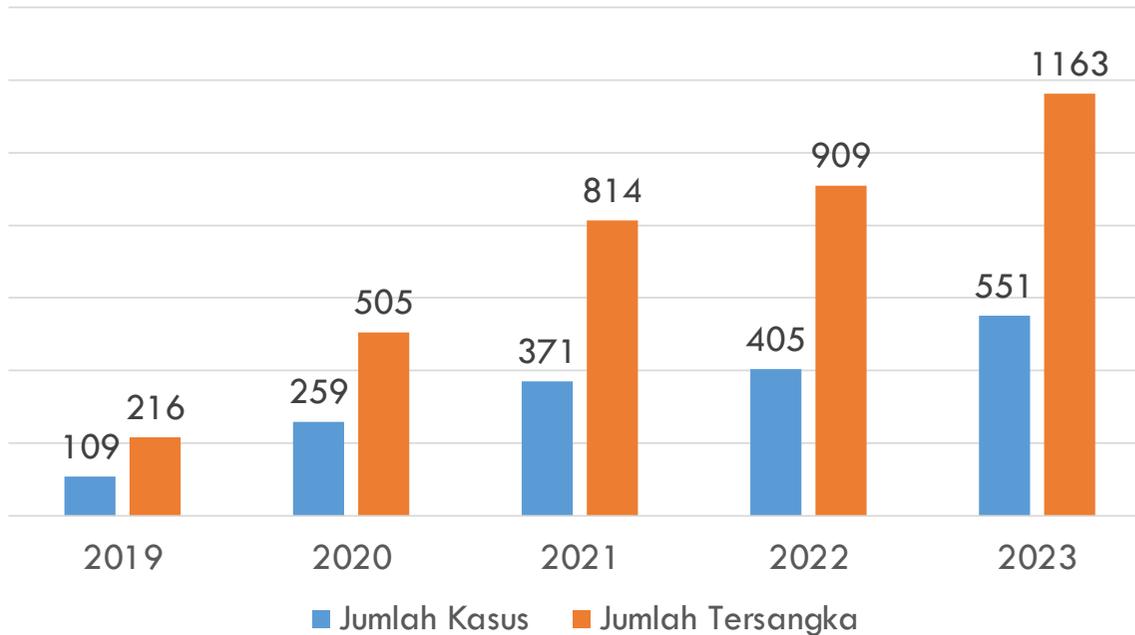
Kinerja Penegak Hukum Tahun 2023

	551 Kasus	192 Kasus	48 kasus
	1.163 tersangka	385 tersangka	147 tersangka
	Rp26,7 triliun	Rp960 miliar	Rp705 miliar

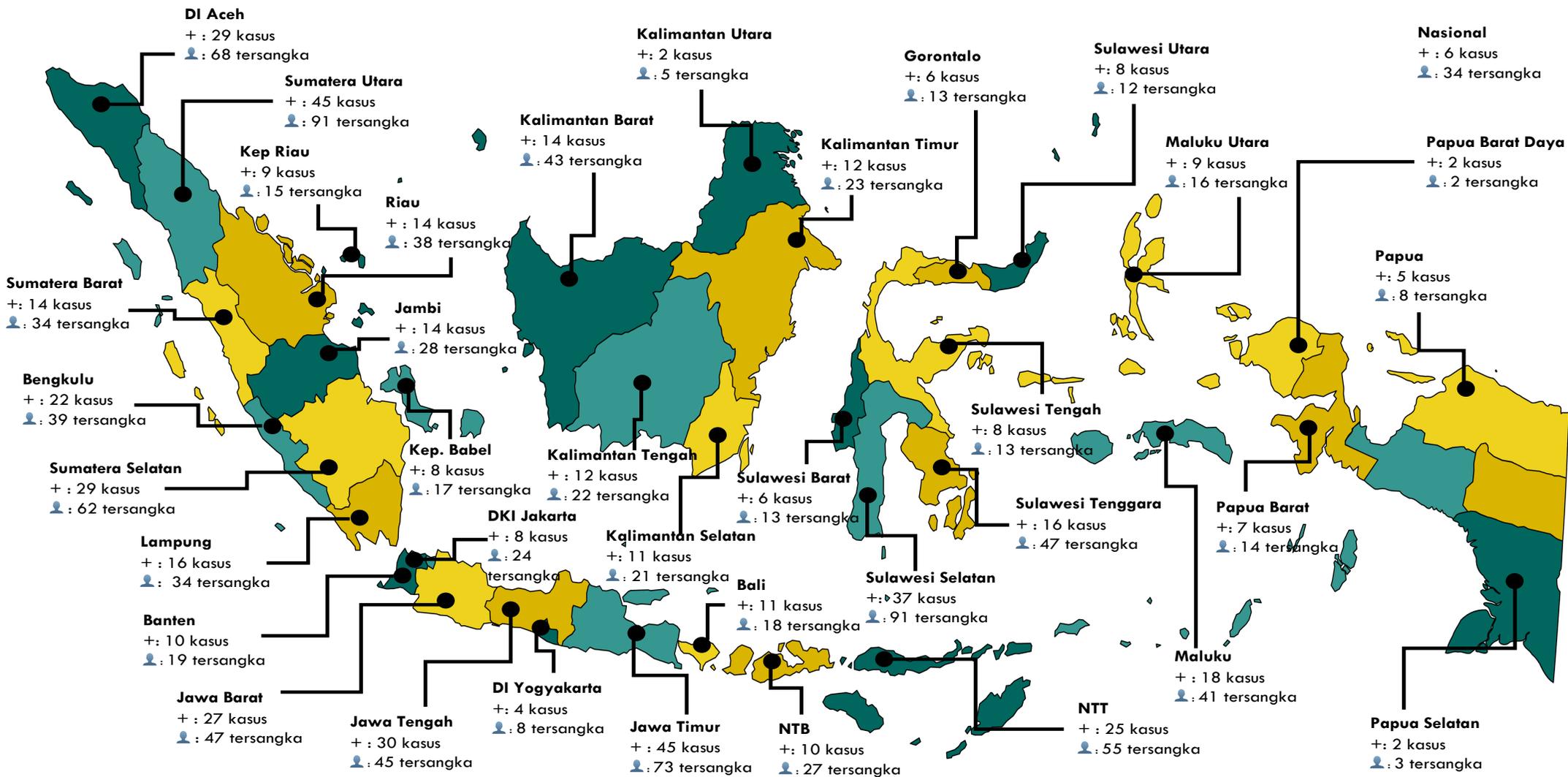


Kejaksaan Republik Indonesia

Tren Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan (2019-2023)



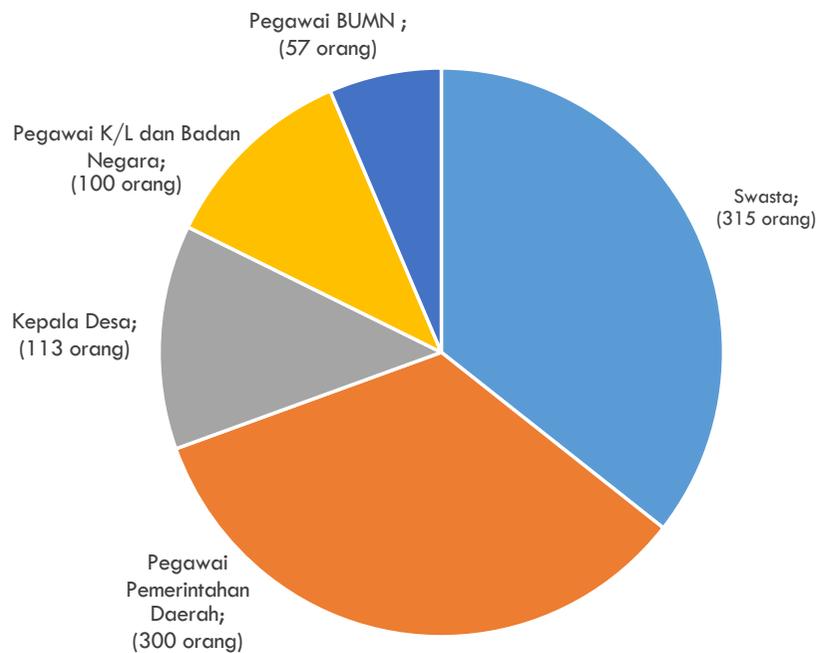
- Pada tahun 2023, Kejaksaan berhasil mengungkap korupsi dengan potensi kerugian negaranya mencapai Rp26,7 triliun
- Besarnya potensi kerugian negara yang ditangani oleh Kejaksaan beberapa tahun terakhir, sejalan dengan strategi institusi untuk mendorong penanganan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan perekonomian negara;
- Akan tetapi, Kejaksaan perlu menekankan agar setiap nominal kerugian negara yang terungkap, dapat dipulihkan melalui sita eksekusi – **(perlu ada evaluasi dari penanganan kasus korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya)**



Pemetaan Wilayah Penindakan Korupsi Kejaksaan Tahun 2023



Pemetaan Aktor Korupsi oleh Kejaksaan

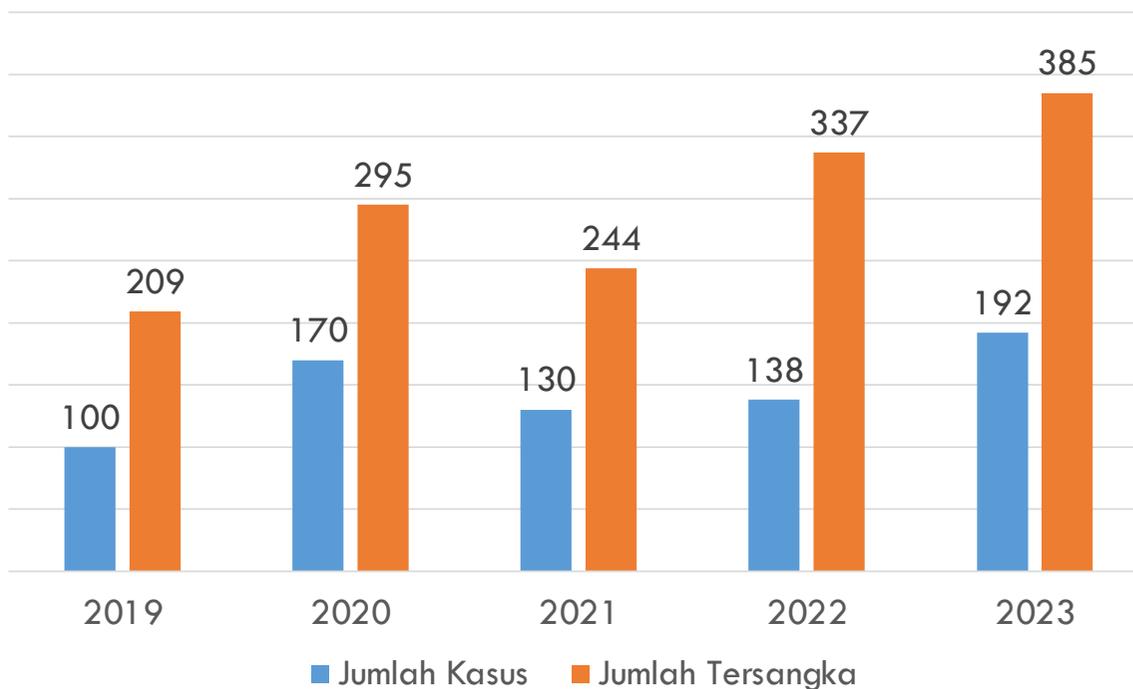


- Kejaksaan terpantau belum melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan kategori *high profile*
- Tercatat hanya ada satu kasus yang tersangkanya memiliki irisan politik, yaitu Menkominfo, Johny G. Plate dalam perkara korupsi BTS 4G. Namun ada sejumlah catatan atas inisiatif pengembangan kasus yang belum dilakukan oleh penyidik, yakni dalam kluster pengamanan perkara.

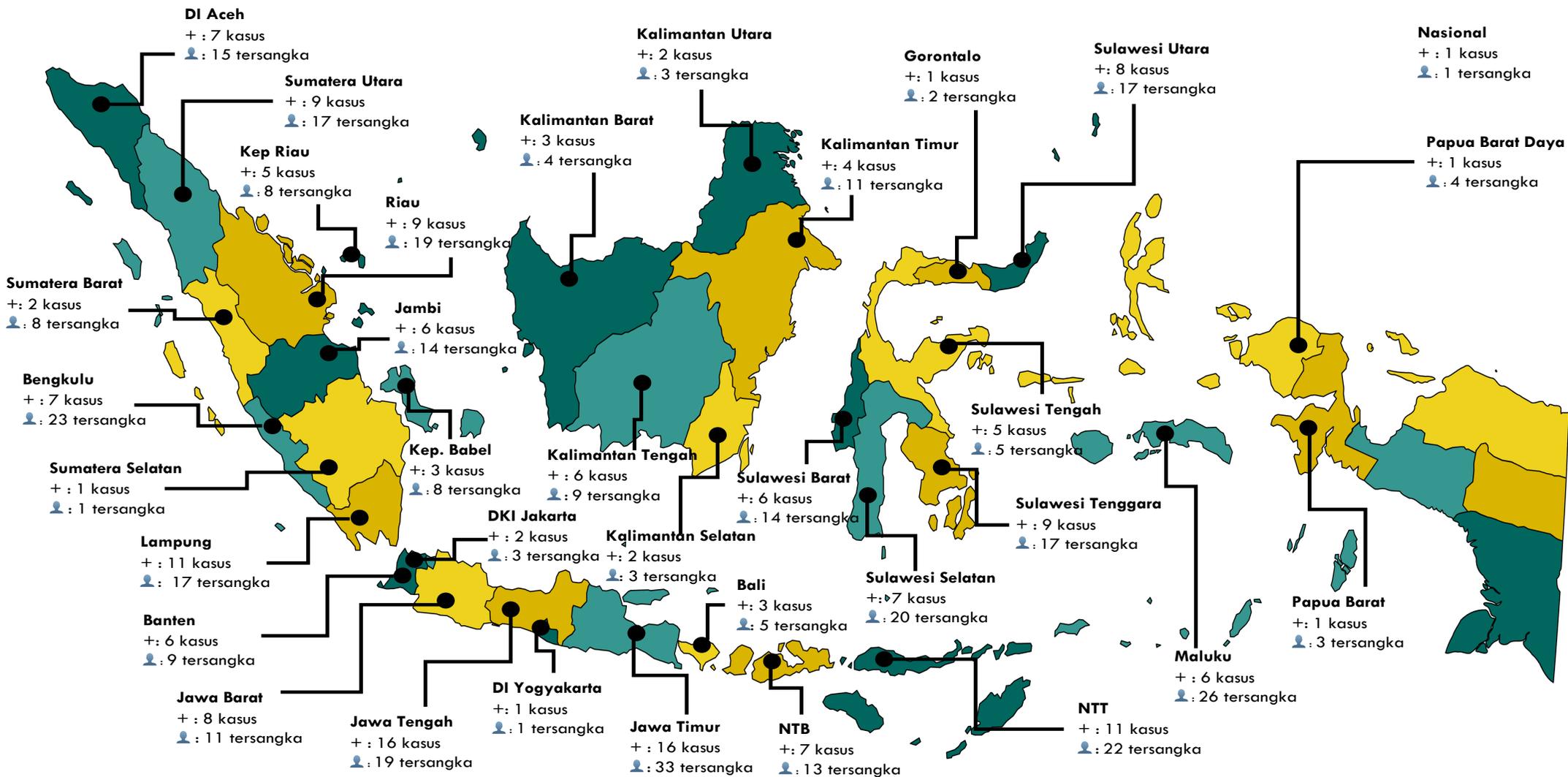


Kepolisian Republik Indonesia

Tren Penindakan Korupsi oleh Kepolisian (2019-2023)



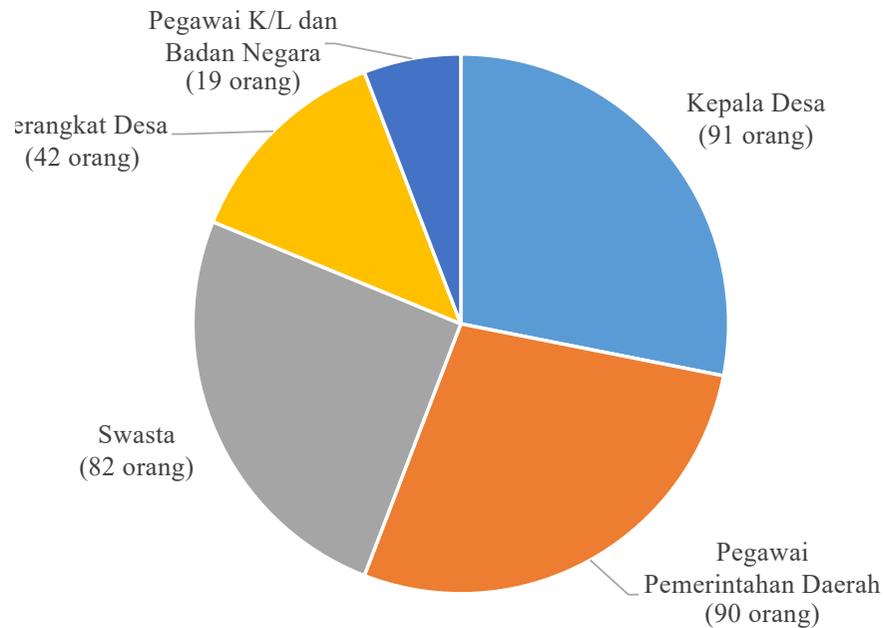
- Dalam lima tahun terakhir, penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kepolisian cenderung mengalami stagnasi;
- Hal ini patut diduga karena penindakan korupsi bukan menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh korps Bhayangkara ini.
- Potensi kerugian negara dari kasus yang berhasil diungkap sebesar Rp960 miliar



Pemetaan Wilayah Penindakan Korupsi Kepolisian Tahun 2023



Pemetaan Aktor Korupsi oleh Kepolisian

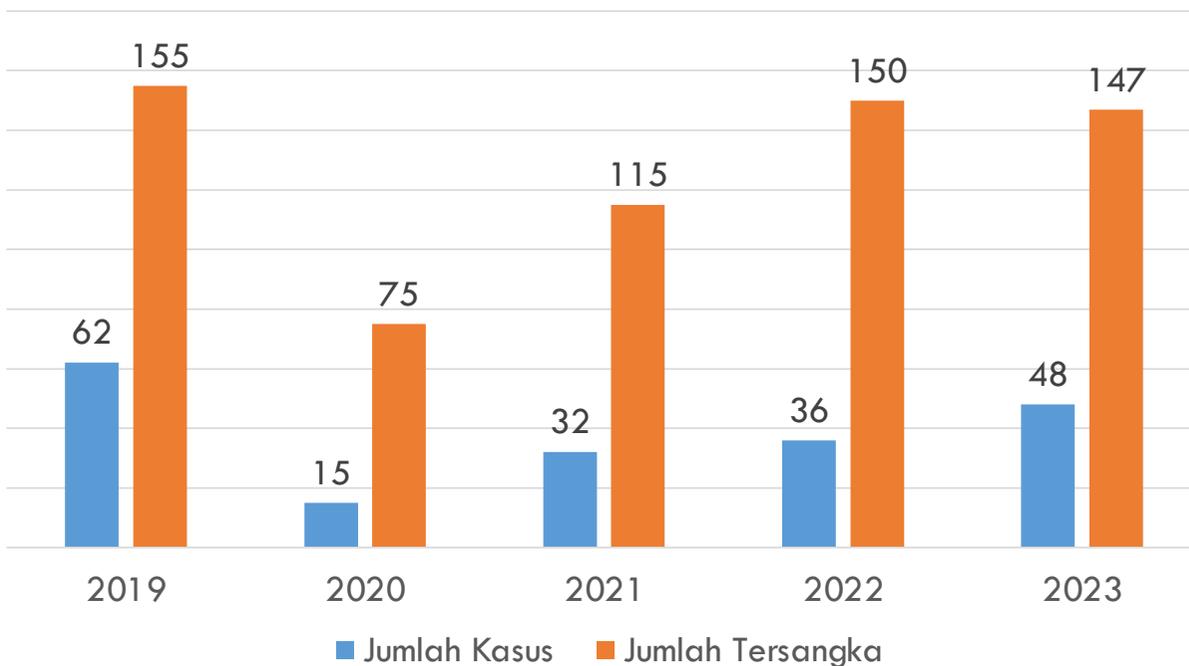


- Berdasarkan hasil pemantauan dari aktor yang ditindak oleh Kepolisian, tersangka yang ditangani masih sebatas pada jabatan pelaksana
- Sekalipun pada tahun 2023 berhasil mengungkap kasus yang melibatkan Ketua KPK 2019-2024, Firli Bahuri, namun proses hukumnya masih menjadi persoalan hingga laporan ini diluncurkan
- Tidak ada upaya dari Kepolisian untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

Tren Penindakan Korupsi oleh KPK (2019-2023)

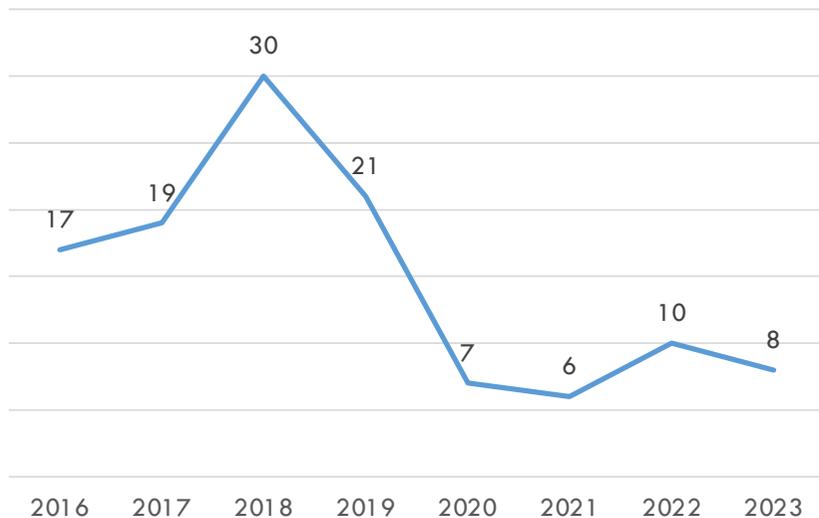


- Konsideran pembentukan KPK didasarkan pada fakta bahwa penegak hukum lain belum efektif dan efisien menangani perkara tipikor
- Namun sejak mengalami revisi UU pada tahun 2019, penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami stagnasi ketimbang sebelum adanya revisi;
- Hanya KPK yang menangani kasus pencucian uang pada tahun 2023
- Pada tahun 2023, dari 48 kasus yang ditangani KPK, hanya 8 yang menggunakan mekanisme tangkap tangan (OTT);

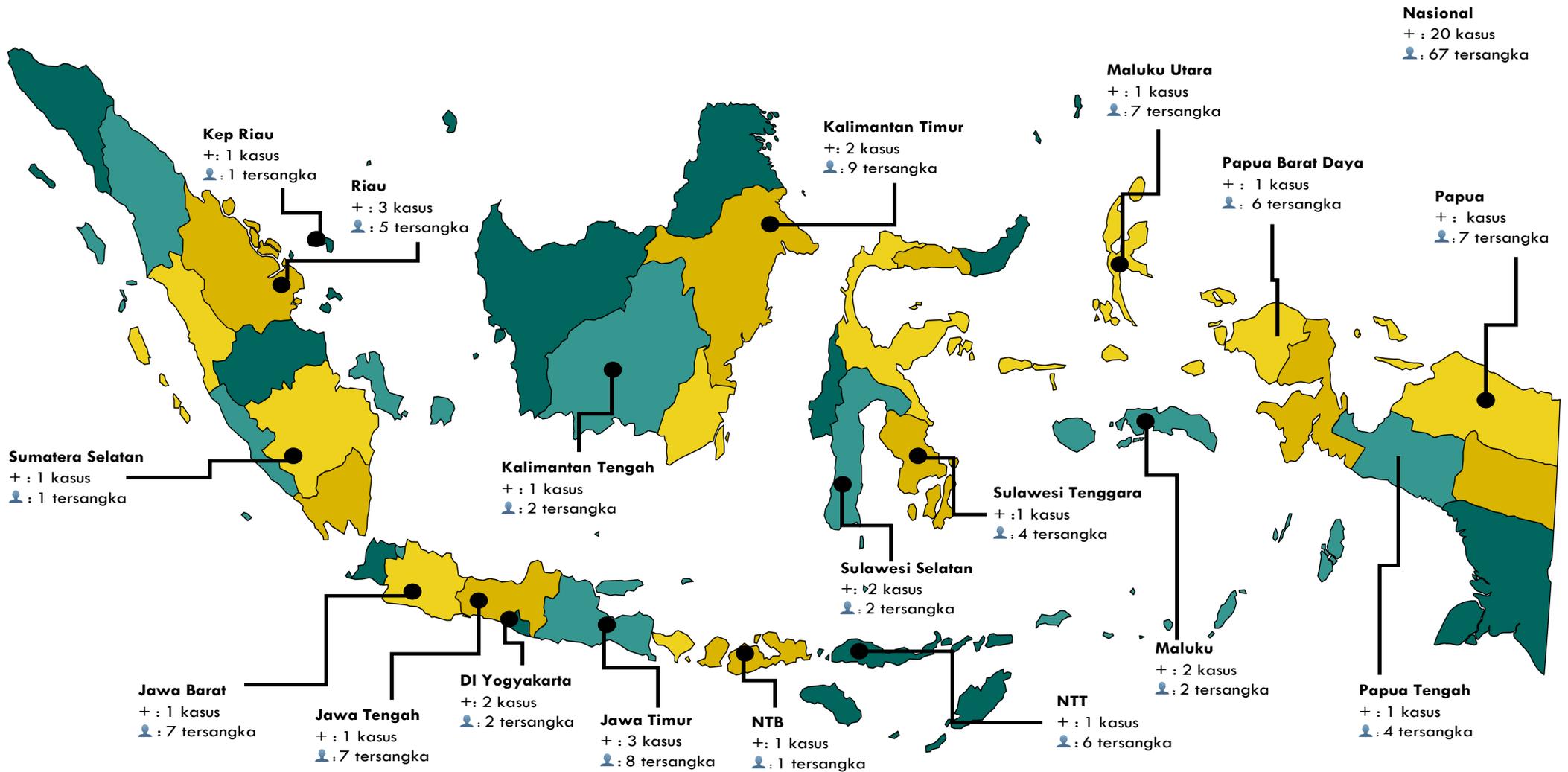


Data OTT KPK 2016-2023

Data OTT KPK 2016-2023



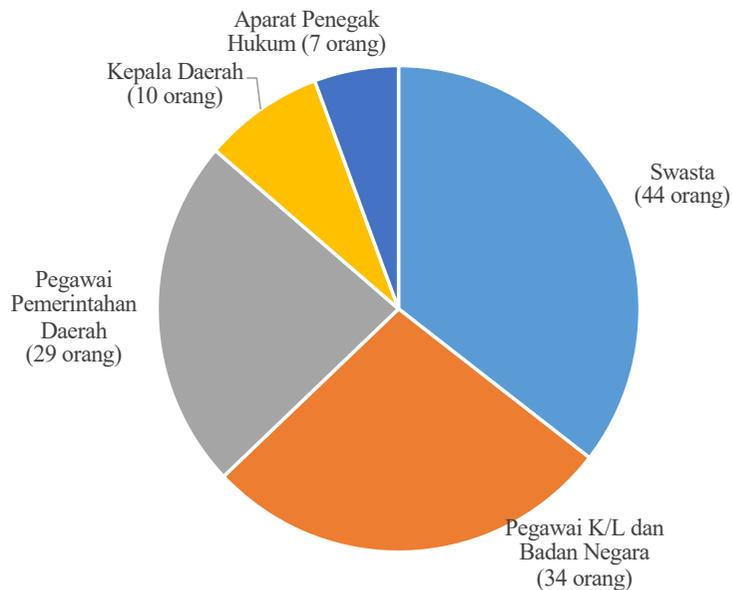
- OTT selama ini diandalkan oleh KPK untuk menjerat banyak high level actor, seperti Ketua MK, Hakim MA, Menteri, hingga anggota dan pimpinan DPR;
- Di era Firli, OTT tidak lagi menjadi andalan sehingga wajar jika tren penindakan oleh KPK kian merosot



Pemetaan Wilayah Penindakan Korupsi KPK Tahun 2023



Pemetaan Aktor Korupsi oleh KPK



- Poin penting hadirnya KPK adalah jangkauan penegakan hukum yang mencakup aktor strategi dalam pemerintahan – **Ada 10 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi**
- Selain itu, ada 7 dari kalangan penegak hukum yang ditangani oleh KPK – Kerja yang sejalan dengan amanat Pasal 11 UU KPK
- Ditetapkan Ketua KPK, Firlil Bahuri diharapkan mampu memperbaiki kinerja KPK yang diduga tersendat akibat gaya kepemimpinan yang kontroversial



Rekomendasi

Pemerintah dan DPR

1. Masifnya tren potensi kerugian negara selama lima tahun terakhir perlu secara serius bagi pemerintah dan DPR untuk memperketat pengawasan atas pengelolaan keuangan negara
2. Pemerintah dan DPR segera memprioritaskan pembahasan dan pengesahan sejumlah produk legislasi yang mendukung upaya penindakan korupsi, seperti revisi UU Tipikor dan Rancangan UU Perampasan Aset
3. Pemerintah pusat dan daerah segera mengoptimalisasi peran Inspektorat yang berfungsi sebagai APIP untuk mencegah korupsi di lingkup pemerintahan



Rekomendasi

Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)

1. Aparat Penegak Hukum, terutama Kejaksaan dan Kepolisian harus menyediakan informasi umum penanganan perkara tipikor dan tindak lanjutnya yang dapat diakses oleh publik;
2. Setiap pimpinan penegak hukum harus segera mengevaluasi kinerja penyidiknya dan melakukan upaya peningkatan kapasitas secara berkala
3. Setiap aparat penegak hukum harus lebih aktif mengarusutamakan penggunaan pasal pencucian uang sebagai upaya pemulihan aset tipikor

TERIMA KASIH

